

**KEWENANGAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI POLITIK
TERHADAP REKOMENDASI CALON KEPALA DAERAH**

(Studi Kasus Partai Demokrat, PKB dan Gerindra)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam
Program Studi Magister Hukum Tata Negara



Oleh :
Moh. Ishomuddin
NIM. 02240423004

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Moh. Ishomuddin

NIM : 02240423004

Program Studi : Magister Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Hukum

Institusi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sunggu menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya, atau karya tulis saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Juni 2025

Saya yang menyatakan,



Moh. Ishomuddin

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul “Kewenangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik Terhadap Rekomendasi Calon Kepala Daerah (Studi Kasus Partai Demokrat, PKB dan Gerindra)” yang ditulis oleh Moh. Ishomuddin ini telah disetujui
Pada tanggal 10 Juni 2025.

Oleh:

PEMBIMBING I



Prof. Dr. Sri Warjiyati, MH
NIP. 196808262005012001

PEMBIMBING II



Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, S.H.I., M.Si.
NIP. 197911052007011019

PENGESAHAN PENGUJI

Tesis dengan judul “Kewenangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik Terhadap Rekomendasi Calon Kepala Daerah (Studi Kasus Partai Demokrat, PKB dan Gerindra)”, yang ditulis oleh Moh. Ishomuddin, NIM. 02240423004 ini telah dipertahankan di depan sidang majelis munaqasah tesis UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 18 Juni 2025 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Pascasarjana Strata Dua dalam Prodi Magister Hukum Tata Negara.

Majelis Sidang Munaqasah:

Ketua Penguji



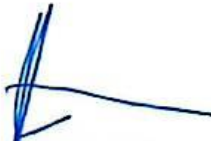
Prof. Dr. Sri Warjiyati, MH
NIP. 196808262005012001

Sekretaris Penguji



Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, S.H.I., M.Si.
NIP. 197911052007011019

Penguji I



Dr. H. Muwahid, S.H., M.Hum.
NIP. 197803102005011004

Penguji II



Dr. Achmad Fageh, M.H.I.
NIP. 197306032005011004

Surabaya, 25 Juni 2025
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. H. Sugiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 19630327199032001

PERNYATAAN PUBLIKASI
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini,
saya:

Nama : Moh. Ishomuddin

NIM : 02240423004

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Magister Hukum Tata Negara

E-mail address : ishomuddinmoh555@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Sekripsi ☒ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul : KEWENANGAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI POLITIK
TERHADAP REKOMENDASI CALON KEPALA DAERAH (Studi Kasus
Partai Demokrat, PKB dan Gerindra)

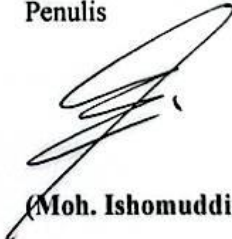
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 7 Januari 2025

Penulis



(Moh. Ishomuddin)

ABSTRAK

Tesis ini membahas dua pokok permasalahan utama yang berkaitan dengan dominasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik dalam proses rekomendasi calon kepala daerah. Pertama, bagaimana prosedur dan tahapan perolehan rekomendasi calon kepala daerah dari DPP Partai Politik dalam kajian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Kedua, bagaimana implikasi kewenangan tersebut terhadap prinsip desentralisasi politik di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan topik penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan DPP dalam memberikan rekomendasi calon kepala daerah bersifat sentralistik, sebagai konsekuensi Pasal 42 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Namun hal ini bertentangan dengan semangat membangun partai politik yang demokratis dan terbuka, terutama dalam konteks rekomendasi calon kepala daerah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.

Demi memperkuat demokrasi lokal dan mewujudkan desentralisasi politik yang substantif, diperlukan revisi regulasi serta reformasi internal partai yang mengedepankan prinsip transparansi, keterlibatan kader daerah, dan penghormatan terhadap aspirasi lokal.

Kata Kunci: Kewenangan Partai Politik, Rekomendasi Calon Kepala Daerah, Desentralisasi Politik.

ABSTRACT

This thesis discusses two main issues related to the dominance of the Central Leadership Council (DPP) of political parties in the process of recommending regional head candidates. First, the procedures and stages for obtaining recommendations for regional head candidates from the DPP of Political Parties under the review of Law Number 2 of 2011 concerning Political Parties and Law Number 10 of 2016 concerning the Election of Governors, Regents, and Mayors. Second, the implications of this authority on the principle of political decentralization in Indonesia.

This research employs a normative juridical method with a legislative and case study approach. The analysis is conducted through qualitative descriptive methods using primary, secondary, and tertiary legal materials relevant to the research topic.

The findings indicate that the DPP's authority in providing recommendations for regional head candidates is centralized, as a consequence of Article 42 of Law Number 10 of 2016. However, this contradicts the spirit of building democratic and open political parties, particularly in the context of recommending regional head candidates under Law Number 2 of 2011.

To strengthen local democracy and achieve substantive political decentralization, regulatory revisions and internal party reforms are necessary, emphasizing the principles of transparency, the involvement of regional cadres, and respect for local aspirations.

Keywords: *Political Party Authority, Recommendation of Regional Head Candidates, Political Decentralization.*

DAFTAR ISI

	HALAMAN
SAMPUL DEPAN.....	i
SAMPUL DALAM	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
PENGESAHAN PENGUJI	vii
TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
UCAPAN TERIMA KASIH	xi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Penelitian Terdahulu.....	7
G. Metode Penelitian.....	9
H. Sistematika Penulisan	11
BAB II.....	13
KAJIAN TEORI.....	13
A. Teori Demokrasi.....	13
B. Teori Partai Politik	18
C. Teori Desentralisasi	21
BAB III	27
PENGATURAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA.....	27
A. Partai Politik di Indonesia.....	27
1. Sejarah Perkembangan Partai Politik di Indonesia.....	27
2. Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	31
B. Profil Partai Demokrat, PKB dan Gerindra.....	33
1. Profil Partai Demokrat	33
2. Profil Partai PKB.....	35
3. Profil Partai Gerindra.....	38
C. Dasar Hukum Rekomendasi Calon Kepala Daerah oleh Partai Politik	40
1. Undang-Undang Tentang Partai Politik	45
a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008	45

b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011	47
2. Undang-Undang Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ...	48
a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004	48
b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007	50
c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014	53
d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2014.....	55
e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015	58
f. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016	61
D. Pemberian Rekomendasi Calon Kepala Daerah oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.....	69
1. Partai Demokrat	70
2. Partai Kebangkitan Bangsa	72
3. Partai Gerindra.....	74
BAB IV	77
ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	77
A. Prosedur dan Tahapan Perolehan Rekomendasi Calon Kepala Daerah dari Partai Demokrat, PKB dan Gerindra	77
1. Partai Demokrat	78
2. Partai PKB	80
3. Partai Gerindra.....	83
B. Implikasi Rekomendasi Calon Kepala Daerah oleh Pimpinan Pusat Partai Politik Terhadap Demokrasi di Indonesia.....	87
1. Dampak Sentralisasi Partai Politik dalam Rekomendasi Calon Kepala Daerah	87
a. Melemahkan Demokrasi di Tingkat Lokal	88
b. Potensi Praktik Transaksional Meningkat.....	92
c. Memperlemah Otonomi Daerah	95
d. Menghambat Regenerasi Politik Lokal.....	97
2. Urgensi Reformasi Regulasi untuk Menciptakan Desentralisasi dalam Partai Politik	101
a. Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011	105
b. Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016	110
c. Urgensi Perubahan Internal Partai Politik.....	114
BAB V.....	119
PENUTUP	119
A. Kesimpulan.....	119
B. Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA.....	121

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, Leo. "Pilkada Dan Dinamika Politik Lokal." (*No Title*), 2009.
- Asshiddiqie, Jimly. "Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi." *Jakarta: Sinar Grafika*, 2011, 198–234.
- Axford, Barrie. "An Introduction Politics, Second Edition. Landon and New York." In *Politics*. Routledge, 2002.
- Birham, Rizki Emil. *Citizen Lawsuit: Penegakan Hukum Alternatif Bagi Warga Negara*. Universitas Brawijaya Press, 2019.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia pustaka utama, 2003.
- Budiman, Hendra. *Pilkada Tidak Langsung & Demokrasi Palsu*. MediaPressindo, 2018.
- Crotty, Richard S Katz dan William. *Handbook Partai Politik (Terj)*. Nusa Media, Bandung, 2014.
- Diamond, Larry. *Developing Democracy: Toward Consolidation*. JHU press, 2003.
- Feri Amsari, S.H., M.H., L.L.M. *Memetakan Permasalahan Demokrasi Partai. Prosiding Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-3*. Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2016.
- Firmanzah, Ph D. *Mengelola Partai Politik: Komunikasi Dan Positioning, Ideologi Politik Dan Era Demokrasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Franz Magnis Suseno. "Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis," 1997.
- Haboddin, Muhtar. *Dinamika Pilkada Dan Demokrasi Lokal Di Indonesia*. Universitas Brawijaya Press, 2016.
- Hidayat, Syarif. *Too Much, Too Soon: Local State Elite's Perspective on and the Puzzle of Contemporary Indonesian Regional Autonomy Policy*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Holmes, Leslie. "Comparative Government and Politics." In *The Australian Study of Politics*, 238–56. Springer, 2009.
- Huda, Uu Nurul. *Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia*. Fokusmedia, 2020.
- Ketut Putra Erawan. "New Breed of Politicians?" *UGM, Program Ilmu Politik Dan PSKP*, 2007.

- Koirudin. *Partai Politik Dan Agenda Transisi Demokrasi: Menakar Kinerja Partai Politik Era Transisi Di Indonesia*. Pustaka Pelajar, 2004.
- Litvack, Jennie Ilene, Junaid Ahmad, and Richard Miller Bird. *Rethinking Decentralization in Developing Countries*. World Bank Publications, 1998.
- Lubis, M Solly. *Hukum Tata Negara. Bandung*. Mandar Maju, 2008.
- Mahfud, Moh. "Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan/Prof. Dr. Moh. Mahfud MD," 2003.
- Marijan, Kacung. "Pilkada Langsung: Resiko Politik, Biaya Ekonomi, Akuntabilitas Politik Dan Politik Lokal." *Indonesia*, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017.
- Mayo, Henry B. "An Introduction to Democratic Theory." (*No Title*), 1960.
- Michels, Robert. "Partai Politik: Kecenderungan Oligarkis Dalam Birokrasi," 1984.
- Moh. Mahfud MD. *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Gamma Media, 1999.
- Naning, Ramdlon. "Cita Dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia Di Indonesia." (*No Title*), 1983.
- Noor, Muhammad. *Memahami Desentralisasi Indonesia*. Samarinda: Interpena, 2021.
- Pamungkas, Sigit, and Utan Parlindungan. *Partai Politik: Teori Dan Praktik Di Indonesia*. Institute for Democracy and Welfarism, 2011.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Tata Negara Di Indonesia*. Jakarta. Dian Rakyat, 1977.
- Prof. Dr Nurliah Nurdin, S. Sos, MA. *Paradoks Sentralisasi Politik Dan Desentralisasi Pemerintahan: Membangun Demokrasi Yang Mensejahterakan*. IPDN PRESS, 2019.
- Purwo Santoso. *Pelembagaan Demokrasi Pasca Pemilu 2004*. UGM, 2011.
- Rais, M Amien. "Demokrasi Dan Proses Politik." (*No Title*), 1986.
- Ramlan Surbakti dan Didik Supriyanto. *Mendorong Demokratisasi Internal Partai Politik. Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*, 2013.
- Samidjo. *Ilmu Negara*. PT. Armico, 1985.
- Sarundajang, Sinyo Harry. "Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah." (*No Title*), 1999.

Siboy, H Ahmad, and M H SH. *Pengantar Hukum Pilkada*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2023.

Soejono, Abdurrahman. "Metode Penelitian Hukum." *Jakarta: Rineka Cipta*, 2003.

Soekanto, Soerjono. "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat," 2007.

Soemitro, Ronny Hanitijo. "Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Cetakan Kelima." *Jakarta: Ghalia Indonesia*, 1994.

Tjenreng, Muhammad Baharudin Zubakhrum. *Demokrasi Di Indonesia Melalui Pilkada Serentak*. Penerbit Papas Sinar Sinanti, 2020.

Tri Atmoko, Hengki. "Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sebagai Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah." Universitas Brawijaya, 2009.

Tutik, Titik Triwulan, and M H SH. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Prenada Media, 2016.

———. "Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik Dan Mahkamah Konstitusi." (*No Title*), 2005.

———. "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara," 2011.

———. "Pengantar Penelitian Hukum." (*No Title*), 2006.

Jurnal/Artikel/Makalah

Abdullah, Sait. "Desentralisasi: Konsep, Teori, Dan Perdebatannya." *Dalam Jurnal Desentralisasi* 6, no. 4 (2005).

Agussalem. "Analisis Peran Pengawas Pemilihan Umum (Pemilu) Dalam Pemilihan Legislatif Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007." *Tanfidziy: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Siyasah* 1, no. 1 (2022): 15–34.

Arfianto Purbolaksono. "Praktik Mahar Politik Dan Masa Depan Pilkada Serentak Di Indonesia (Policy Assessment 2020)." *The Indonesian Institute*, 2020.

Arifin, Firdaus. "Politik Dinasti Dan Pembaruan Sistem Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 31, no. 3 (2024): 636–65.

Asgar, Sukitman. "Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Dan Pilkada Sebagai Dasar Legitimasi Kekuasaan Pemerintah." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 3 (2023): 5982–94.

Asrinaldi. *Masihkah Partai Politik Demokratis? Memahami Proses Pencalonan*

Kepala Daerah Dalam Pilkada Serentak. Prosiding Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-3. Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2016.

- Baehaki, Kadimuddin. "Implikasi Politik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 60/PUU-XXII/2024 Terkait Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah." *YUSTISI* 11, no. 3 (2024): 451–60.
- Bambang Eka CW. "Pilkada, Demokrasi Dan Fungsi Pelayanan Publik Pemerintah Daerah (Makalah Disampaikan Dalam Seminar Debat Publik Calon Walikota Jōgyakarta)." *Kerjasama S2 Ilmu Politik UGM, Fisip UMY Dan Fisip Atmajaya*, 2006.
- Bria, Fridus, and Mariano Sengkoen. "Strategi Partai Politik Dalam Rekrutmen Calon Kepala Daerah." *Jurnal Poros Politik* 4, no. 1 (2022): 16–21.
- Chaniago, Pangi Syarwi. "Evaluasi Pilkada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015." *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 1, no. 2 (2016): 196–211.
- Dalilah, Elih, Bekti Selawati, Fitrah Pratama, and Anis Wijayanti. "Benturan Kepentingan Pada Pendanaan Pilkada." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 5, no. 1 (2019): 181–88.
- DPR-RI. Risalah Resmi tentang Rapat Paripurna DPR-RI, Selasa 17 Februari 2014, Jakarta: Republik Indonesia § (2014).
- Eddyono, Luthfi Widagdo. "Wacana Desentralisasi Partai Politik: Kajian Original Intent Dan Pemaknaan Sistematis UUD 1945." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1 (2017): 81–103.
- Febriyanti, Doris, and M Jerry Pratama. "Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Presiden Amerika Serikat Dengan Indonesia." *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 2, no. 1 (2017).
- Gultom, Mangara Maidlando. "Politik Hukum Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota." *Jurnal de Jure* 11, no. 1 (2019).
- Gunawan, Wawan. "Anomali Kewenangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik Dalam Sistem Desentralisasi Pemerintahan Di Indonesia." *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, Dan Administrasi Publik* 1, no. 01 (2018): 111–28.
- Hafid, Moh Maskurudin. "Intermediary Political Analysis: The Role of Political Parties in Single-Candidate Elections." *Syntax Idea* 7, no. 1 (2025): 80–88.
- Karunia, Krisna Angga Vanda. "Politik Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota,” 2017.

Kofi, Angri Dianto, and Erikson Sihotang. “Kewenangan Mengadili Oleh Baswalu Atas Sengketa Proses Yang Di Atur Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum.” *Jurnal Aktual Justice* 9, no. 1 (2024): 67–79.

Mutawalli, Muhammad. “Kewenangan Partai Politik Dalam Penarikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah,” N.D.

Nugroho, Wahyu. “Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pelaksanaan Pemilu Dan Pemilukada Di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 3 (2016): 480–502.

Nurdin, Maharani. “Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu.” *Veritas* 5, no. 2 (2019): 1–17.

Nurfadhilah Arini. “Catatan Pilkada Serentak 2024: Faktor Penyebab Rendahnya Angka Partisipasi Pemilih.” *Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI Vol. XVI*, (2009).

Nuryanti, Sri, M Edison Muchlis, Lili Romli, Syamsuddin Haris, and Tri Rainny Syafarani. “Analisis Proses Dan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Langsung 2005 Di Indonesia.” *Ambiguitas Perdamaian*, 2006, 56.

Rachmiatie, Atie, O Hasbiansyah, E M A Khotimah, and Dadi Ahmadi. “Strategi Komunikasi Politik Dan Budaya Transparansi Partai Politik.” *Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 29, no. 2 (2013): 123–32.

Rahmatunnisa, Mudiayati. “Desentralisasi Dan Demokrasi.” *Jurnal.Unismabekasi.Ac.Id* 1, no. 2 (2011): 1–21.

Rajabi, Achmadudin. “Analisis Kekurangan Perpu No. 2 Tahun 2020 Dari Sisi UU No. 12 Tahun 2011 Jo. UU No. 15 Tahun 2019.” *Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2020.

Ramadhan, Dewa, and Tahegga Primananda Alfath. “Kepastian Hukum Ambang Batas Pencalonan Dalam Sistem Pemilihan Umum Kepala Daerah Yang Demokratis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024.” *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4, no. 2 (2025): 3554–62.

Refani, Era. “Urgensi Desentralisasi Partai Politik (Studi Kasus Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Kampar Periode Sisa 2017-2022).” *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial* 2, no. 1 (2021): 24–37.

Riqiey, Baharuddin. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022.” *JAPHTN-HAN* 2, no. 1 (2023): 109–24.

- SALIM, AGUS. "Pemilihan Kepala Daerah Dalam Proses Demokratisasi Di Daerah (Studi Perbandingan Menurut UU NO. 22 TAHUN 1999 DAN UU NO. 32 TAHUN 2004)." Universitas Islam Indonesia, 2011.
- Sjafrina, Almas Ghaliya Putri. "Dampak Politik Uang Terhadap Mahalnya Biaya Pemenangan Pemilu Dan Korupsi Politik." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 5, no. 1 (2019): 43–53.
- Suhaimi, Else. "Prinsip-Prinsip Umum Rekrutmen Politik Sebagai Landasan Idil Penyusunan Pola Rekrutmen Dalam Ad/Art Partai Politik Di Indonesia." *Jurnal Hukum Tri Pantang* 7, no. 1 (2021): 27–51.
- Suharizal. *Pemilukada, Regulasi, Dinamika Dan Konsep Mendatang*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Sumanto, Dedi, and Salahuddin Nggilu. "Kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Dalam Tata Susunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia." *Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)* 1, no. 1 (2020): 27–38.
- Supatno, Feby Setiyo Susilo. "Pemilukada Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Dengan Perubahan Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2015." *Lex Privatum* 4, no. 2 (2016).
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Grasindo, 2010.
- Suwarno, Suwarno. *Sejarah Politik Indonesia Modern*. Penerbit Ombak, 2012.
- Syahrizal, Ahmad. "Peradilan Konstitusi: Suatu Studi Tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif." (No Title), 2006.
- Utama, Andrew Shandy. "Pengaturan Partai Politik Di Indonesia." *Andrew Law Journal* 2, no. 2 (2023): 44–52.
- Winarti, Novi, and Nazaki Nazaki. "Problematika Kelembagaan Partai Politik: Studi Terhadap Fungsi Representasi Partai Politik Pascareformasi." *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 4, no. 1 (2019): 112–22.
- Witianti, Siti. "Peran Ketua Umum Partai Politik Dalam Pencalonan Kepala Daerah Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Indonesia." *Jurnal Wacana Politik* 4, no. 1 (2019).
- Zamhasari, Zamhasari. "Dampak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Terhadap Demokrasi: Tinjauan Kelebihan Dan Kekurangan Pilkada Serentak Di Indonesia Tahun 2024." *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora* 3, no. 10 (2024): 873–80.
- . "Tim 7 Pembentukan UU Politik (Dipimpin Oleh Prof Ryaas Rasyid,

Beranggotan Prof Affan Gaffar, Prof Ramlam Surbakti, Andi A Mallarangeng, PhD, Rapat Dilakukan Di Ruang Rapat Kampus IIP Jakarta Tahun 1998-1999)." *Kampus IIP Jakarta*, 1998.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Pemerintah Pusat. "Keppres Nomor 128 Tahun 1961 Tentang Mengakui Sebagai Partai." *Lembaran Negara Republik Indonesia*, 1961.

Indonesia, Pemerintah Pusat. "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jakarta: Republik Indonesia LN.2011/No (2011)*.

Indonesia, Pemerintah Republik. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme," 1999.

Indonesia, Republik. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Jakarta: Republik Indonesia § (2014).

Indonesia, Pemerintah Pusat. "Undang-Undang Dasar 1945." Dewan Pimpinan PNI, Department Pen. Prop. Pen. Kader, 1959.

Indonesia, Pemerintah Pusat. Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Jakarta: Republik Indonesia § (2015).

Indonesia, Pemerintah Pusat. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, Jakarta: Republik Indonesia § (2016).

Indonesia, Pemerintah Pusat. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Jakarta: Republik Indonesia § (2008).

Indonesia, Pemerintah Pusat. "Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu)." *Jakarta: Republik Indonesia*, 2007.

Indonesia, Pemerintah Pusat. Undang-undang nomor 22 tahun 2014 tentang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Jakarta: Republik Indonesia § (2014).

Indonesia, Pemerintah Pusat. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah." *Jakarta (Id): Ri*, 2004.

Indonesia, Pemerintah Pusat. "Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik." *BPK RI*, 2011.

Indonesia, Pemerintah Pusat. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota,” 2016.

Kemendagri. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gub, Jakarta: Republik Indonesia § (2016).

MK-RI. Salinan Putusan Perkara Nomor 60/PUU-XXII/2024, Jakarta: Republik Indonesia § (2024).

Partai Demokrat,. “Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga.” *Dewan Pimpinan Pusat*, 2020.

Partai Gerindra,. “Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga.” *Dewan Pimpinan Pusat*, 2020.

Partai PKB,. “Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga.” *Dewan Pimpinan Pusat*, 2024.

PKB. Peraturan PKB Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penjaringan, Penetapan, dan Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota., Jakarta § (2019).

Internet

Abdul Aziz Qomar. “Rapimcab Partai Gerindra Gresik Bulat Usung Dokter Alif Calon Bupati, Bukan Cawabup.” *klikjatim.com*, 2024. <https://klikjatim.com/rapimcab-partai-gerindra-gresik-bulat-usung-dokter-alif-calon-bupati-bukan-cawabup/>

ACHMAD RIZAL. “Pilkada Surabaya, Golkar Siapkan Bayu Airlangga.” *RMOL.ID*, 2024. <https://rmol.id/politik/read/2024/05/03/618973/pilkada-surabaya-golkar-siapkan-bayu-airlangga> .

Agnes Z. Yonatan. “Berapa Utang Luar Negeri Indonesia Saat Ini?” *goodstats.id*, 2025. <https://goodstats.id/article/berapa-utang-luar-negeri-indonesia-saat-ini-g6Aeq> .

Ahmad Faiz. “DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada.” *TEMPO.co*, 2016. <https://www.tempo.co/hukum/dpr-sahkan-undang-undang-pilkada-1358806> .

Amin Wahyudi. “Peta Politik Pilkada Banyumas, Kubu PDI Perjuangan Vs KBM.” *Serayu News*, 2024. <https://serayunews.com/peta-politik-pilkada-banyumas-kubu-pdi-perjuangan-vs-kbm> .

- Ananto Pradana. “Beri Rekomendasi Ke Khofifah, Adik Prabowo Sebut Nama Emil.” ANTARA News, 2024. <https://jatim.antaranews.com/berita/752745/beri-rekomendasi-ke-khofifah-adik-prabowo-sebut-nama-emil> .
- Antikorupsi, Pusat Edukasi. “Alasan Dan Potensi-Potensi Korupsi Kepala Daerah.” KPK-RI Jakarta, 2022. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220428-alasan-dan-potensi-potensi-korupsi-kepala-daerah> .
- . “Biaya Dan Mahar Politik Memicu Korupsi.” KPK-RI Jakarta, 2023. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230904-biaya-dan-mahar-politik-memicu-korupsi> .
- APRIANTO. “22 Gubernur Dan 133 Bupati/Wali Kota Korupsi, Indonesia Dijajah Koruptor.” RM.ID, 2021. <https://rm.id/baca-berita/nasional/96293/22-gubernur-dan-133-bupatiwali-kota-korupsi-indonesia-dijajah-koruptor> .
- Ari Hermawan. “Pilbup Ngawi Berpotensi Ada Tiga Pasangan Calon Jika Duplikat Koalisi Pilpres.” Suaraindonesia.co.id, 2024. <https://suaraindonesia.co.id/news/politik/6635d468b98ab/pilbup-ngawi-berpotensi-ada-tiga-pasangan-calon-jika-duplikat-koalisi-pilpres#!>
- Arif, Bagus. “18 PAC Gerindra Rekom Dr Alif Maju Calon Bupati Gresik.” garudasatu.id, 2024. <https://www.garudasatu.id/18-pac-gerindra-rekom-dr-alif-maju-calon-bupati-gresik> .
- Badan Pusat Statistik. “Persentase Penduduk Miskin September 2024 Turun Menjadi 8,57 Persen.” Jakarta: Republik Indonesia, 2024. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/01/15/2401/persentase-penduduk-miskin-september-2024-turun-menjadi-8-57-persen-.html> .
- Bagus Pribadi. “PKB Usung Duet Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim Di Pilkada Jawa Timur.” TEMPO.co, 2024. <https://www.tempo.co/politik/pkb-usung-duet-luluk-nur-hamidah-lukmanul-khakim-di-pilkada-jawa-timur-14919> .
- BASYARI, IQBAL. “Sah, Demokrat Usung Khofifah-Emil Di Pilgub Jatim.” Kompas.id, 2024. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/07/10/sah-demokrat-usung-khofifah-emil-di-pilgub-jatim> .
- Burhani, Ruslan. “Sejumlah Aktivis Demokrasi Tolak Pilkada Dipilih DPRD.” ANTARA News, 2014. <https://www.antaranews.com/berita/452354/sejumlah-aktivis-demokrasi-tolak-pilkada-dipilih-dprd> .
- Candra Yuri Nuralam. “601 Kasus Korupsi Menyeret Kepala Daerah Selama 19 Tahun.” Media Indonesia, 2024. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/658129/601-kasus-korupsi-menyeret-kepala-daerah-selama-19-tahun> .

- CNN-Indonesia. "Larangan Retreat Bersifat Internal, PDIP Minta Tak Dibenturkan." Jakarta: Republik Indonesia, 2025.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250221231554-32-1201193/larangan-retreat-bersifat-internal-pdip-minta-tak-dibenturkan> .
- . "Sejarah Pilkada Serentak Di Indonesia Dari Masa Ke Masa." Jakarta, 2024.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241121140214-617-1169125/sejarah-pilkada-serentak-di-indonesia-dari-masa-ke-masa> .
- Danny. "Sampai Kini, Gerindra Belum Lakukan Penjaringan Pilwali Surabaya." optika.id, 2024. <https://optika.id/news-66780-sampai-kini-gerindra-belum-lakukan-penjaringan-pilwali-surabaya> .
- Detik.com. "Pupus Harapan Anna Muawanah Jadi Bupati 2 Periode Usai PKB Cabut Rekom." Jakarta: Republik Indonesia, 2024.
<https://www.detik.com/jatim/pilkada/d-7515770/pupus-harapan-anna-muawanah-jadi-bupati-2-periode-usai-pkb-cabut-rekom> .
- . "Subandi Buka Suara Usai Dinonaktifkan PKB Gegara Maju Pilbup Sidoarjo." Jakarta: Republik Indonesia, 2024.
<https://www.detik.com/jatim/pilkada/d-7522987/subandi-buka-suara-usai-dinonaktifkan-pkb-gegara-maju-pilbup-sidoarjo> .
- Eko Sudjarwo. "Abdul Ghofur-Firosya Shalati Kantongi Rekom Demokrat Maju Pilbup Lamongan." Detikcom, 2024. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7481154/abdul-ghofur-firosya-shalati-kantongi-rekom-demokrat-maju-pilbup-lamongan> .
- . "PKB Beri Rekom Abdul Ghofur-Firosya Shalati Maju Pilbup Lamongan 2024." detikJatim, 2024. <https://www.detik.com/jatim/pilkada/d-7502862/pkb-beri-rekom-abdul-ghofur-firosya-shalati-maju-pilbup-lamongan-2024> .
- . "Yuhronur Efendi Kantongi Rekom Gerindra Maju Di Pilbup Lamongan 2024." detikJatim, 2024. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7467437/yuhronur-efendi-kantongi-rekom-gerindra-maju-di-pilbup-lamongan-2024> .
- Faiq Azmi. "Sah! Gerindra Usung Eri-Armuji Di Pilwali Surabaya." detikJatim, 2024. <https://www.detik.com/jatim/pilkada/d-7511396/sah-gerindra-usung-eri-armuji-di-pilwali-surabaya> .
- Faizi, Lutfan. "Daftar Ketua Umum Partai Demokrat, Dari Masa Jabatan Tersingkat Hingga Terlama." Nasional.sindonews.com, 2023.
<https://nasional.sindonews.com/read/1069787/12/daftar-ketua-umum-partai-demokrat-dari-masa-jabatan-tersingkat-hingga-terlama-1681189472> .

- Farid. "Demokrat Resmi Dukung Khofifah-Emil Maju Pilgub Jatim 2024." CNN Indonesia, 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231213113540-617-1036647/demokrat-resmi-dukung-khofifah-emil-maju-pilgub-jatim-2024> .
- Febrian Kisworo. "Langkah Mengejutkan, PKB Putar Haluan Dukung Gus Yani - Dokter Alif Di Pilkada Gresik." Klik Media Netwok, 2024. <https://www.klikmedianetwork.com/politik-pemerintahan/1945023171/langkah-mengejutkan-pkb-putar-haluan-dukung-gus-yani-dokter-alif-di-pilkada-gresik> .
- Haekal, Attar. "Akademisi Sebut Fenomena Calon Tunggal Pada Pilkada Jadi Bukti Parpol Tak Bisa Hasilkan Kader." nu.or.id, 2024. <https://nu.or.id/nasional/akademisi-sebut-fenomena-calon-tunggal-pada-pilkada-jadi-bukti-parpol-tak-bisa-hasilkan-kader-qei7b> .
- Handoyo. "Prabowo Kembali Pimpin Gerindra! Ketum, Ketua Dewan Pembina, Dan Capres 2029." nasional.kontan.co.id, 2025. <https://nasional.kontan.co.id/news/prabowo-kembali-pimpin-gerindra-ketum-ketua-dewan-pembina-dan-capres-2029>.
- Hanif Manshuri. "Demokrat Jadi Partai Keempat Di Lamongan Yang Buka Pendaftaran Bacabup-Bacawabup Pilkada 2024." TribunJatim.com, 2024. <https://jatim.tribunnews.com/2024/05/01/demokrat-jadi-partai-keempat-di-lamongan-yang-buka-pendaftaran-bacabup-bacawabup-pilkada-2024>.
- . "Mulai Hari Ini, DPC PKB Lamongan Buka Penjaringan Bacabup Dan Bacawabup Pilkada 2024." Surya.co.id, 2024. <https://surabaya.tribunnews.com/2024/04/24/mulai-hari-ini-dpc-pkb-lamongan-buka-penjaringan-bacabup-dan-bacawabup-pilkada-2024>.
- Hendrik Khoirul Muhid. "Penyebab Munculnya Calon Tunggal Lawan Kotak Kosong Di Pilkada." TEMPO.co, 2024. <https://www.tempo.co/politik/penyebab-munculnya-calon-tunggal-lawan-kotak-kosong-di-pilkada--15607>.
- Hukumonline.com. "Pendaftaran Pemilu, Masalah Utama Pilkada 2007." Jakarta, 2008. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pendaftaran-pemilih-masalah-utama-pilkada-2007-hol18328/?page=all>.
- Ibrahim. "Bentuk Tim Penjaringan, Demokrat Surabaya Buka Pendaftaran Calon Kepala Daerah." JatimUpdate.id, 2024. <https://jatimupdate.id/baca-7392-bentuk-tim-penjaringan-demokrat-surabaya-buka-pendaftaran-calon-kepala-daerah>.
- Jemmi, Purwodianto. "PKB Usung Syahrul Munir Di Pilbup Gresik 2024." detikJatim, 2024. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7388169/pkb-usung-syahrul-munir-di-pilbup-gresik-2024>.

- Kompas.com. "Anggaran Pilkada Serentak 2020 Diperkirakan Lebih Dari Rp 15 Triliun." Jakarta, 2019.
<http://nasional.kompas.com/read/2019/10/07/19190211/anggaran-pilkada-serentak-2020-diperkirakan-lebih-dari-rp-15-triliun>.
- Makki, Safir. "AHY Terpilih Aklamasi Jadi Ketum Demokrat 2020-2025." CNN-Indonesia, 2020. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200315135849-32-483577/ahy-terpilih-aklamasi-jadi-ketum-demokrat-2020-2025>.
- Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H. "Perbedaan Konstitusi Tertulis Dan Konstitusi Tidak Tertulis." hukumonline.com, 2023.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-konstitusi-tertulis-dan-konstitusi-tidak-tertulis-lt6294ad68adf6d/>.
- News.detik.com. "KPU: Pelaksanaan Pemilu Kada Serentak 2013 Tak Perlu Perppu." Jakarta, 2013. <https://news.detik.com/berita/d-2220881/kpu-pelaksanaan-pemilu-kada-serentak-2013-tak-perlu-perppu%0A>.
- Nida, Chofifah Qurotun. "Jelang Pilkada 2024, Demokrat Gresik Buka Penjaringan Cabup-Cawabup." GresikSatu, 2024. https://www.gresiksatu.com/jelang-pilkada-2024-demokrat-gresik-buka-penjaringan-cabup-cawabup/#google_vignette.
- Nuraini Faiq. "Sah, PKB Resmi Usung Eri Cahyadi-Armuji Di Pilwali Surabaya 2024, Surat Rekom Diserahkan Cak Imin." jatim.tribunnews.com, 2024. <https://jatim.tribunnews.com/2024/08/18/sah-pkb-resmi-usung-eri-cahyadi-armuji-di-pilwali-surabaya-2024-surat-rekom-diserahkan-cak-imin>.
- Petisi.co. "Hasil Rapimcab Gerindra, Dukung Yes Dalam Pilkada Lamongan." Lamongan, 2024. <https://petisi.co/hasil-rapimcab-gerindra-dukung-yes-dalam-pilkada-lamongan/>.
- PKBNEWS. "DPP PKB Mulai Uji Kelayakan Dan Keputusan Bakal Cakada Se-Indonesia." pkb.id, 2024. <https://pkb.id/read/12417/dpp-pkb-mulai-uji-kelayakan-dan-keputusan-bakal-cakada-se-indonesia/>.
- Radarkarawang.id. "Kader PDIP Pecah Buntut Pemecatan Sutisna." Jawa Barat, 2025. <https://radarkarawang.id/kader-pdip-pecah-buntut-pemecatan-sutisna/>.
- Ranking, World Competitiveness. "Rankings out of 67 Countries." International Institute for Management Development, 2024.
https://www.imd.org/centers/wcc/world-competitiveness-center/rankings/world-competitiveness-ranking/rankings/wcr-rankings/#_tab_Rank.
- Robi, Ardianto. "Fenomena Calon Tunggal Dalam Pilkada Meningkat, Abhan: Menarik Dijadikan Penelitian." bawaslu.go.id, 2021.

<https://bawaslu.go.id/id/berita/fenomena-calon-tunggal-dalam-pilkada-meningkat-abhan-menarik-dijadikan-penelitian>.

SATRYO, AHMAD. “Waspada! 45 Persen Paslon Pilkada Ternyata Merangkap Pengusaha.” RMOL.ID, 2024.

<https://rmol.id/politik/read/2024/11/19/645399/waspada-45-persen-paslon-pilkada-ternyata-merangkap-pengusaha>.

Statistik, Badan Pusat. “Gini Ratio Maret 2024 Tercatat Sebesar 0,379.” Jakarta: Republik Indonesia, 2024.

<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2371/gini-ratio-maret-2024-tercatat-sebesar-0-379-.html>.

Syaifuddin Anam. “Duet Yani-Alif Dipastikan Maju Di Pilkada Gresik 2024 Lewat Gerindra.” JATIMTIMES, 2024.

<https://jatimtimes.com/baca/319392/20240826/062300/duet-yani-alif-dipastikan-maju-di-pilkada-gresik-2024-lewat-gerindra>.

Syuhud. “PKB Resmi Buka Penjaringan Cabup-Cawabup Gresik 2024, Catat Tanggalnya.” BANGSAONLINE.com, 2024.

<https://bangsaonline.com/berita/131310/pkb-resmi-buka-penjaringan-cabup-cawabup-gresik-2024-catat-tanggalnya>.

TEMPO.co. “Demokrat Telah Serahkan Rekomendasi Kepada 508 Calon Bupati Dan Wali Kota Untuk Pilkada 2024.” Jakarta: Republik Indonesia, 2024. <https://www.tempo.co/politik/demokrat-telah-serahkan-rekomendasi-kepada-508-calon-bupati-dan-wali-kota-untuk-pilkada-2024-15407>.

———. “Gerindra Berhentikan Dua Ketua DPC Di NTB Jelang Pilkada 2024, Ada Apa?” Jakarta: Republik Indonesia, 2024.

<https://www.tempo.co/pemilu/gerindra-berhentikan-dua-ketua-dpc-di-ntb-jelang-pilkada-2024-ada-apa--15562>.

———. “Retret: Jalan Menuju Sentralisasi Kebijakan Pemerintah.” Jakarta: Republik Indonesia, 2025. <https://www.tempo.co/kolom/mudarat-retret-kepala-daerah-1211165>.

TEMPO.CO. “Demokrat Usung Eri Cahyadi - Armuji Di Pilkada Surabaya.” Jakarta: Republik Indonesia, 2024. <https://www.tempo.co/politik/demokrat-usung-eri-cahyadi-armuji-di-pilkada-surabaya-38153>.

Titi, Anggraeni. “Calon Tunggal Di Tengah Pragmatisme Dan Hegemoni Elite Politik.” law.ui.ac.id, 2024. <https://law.ui.ac.id/calon-tunggal-di-tengah-pragmatisme-dan-hegemoni-elite-politik-olehtiti-anggraini-s-h-m-h/>.

Vitorio, Mantalaen. “Tok! 37 Paslon Tunggal Versus Kotak Kosong Di Pilkada 2024, Ini Daftarnya.” nasional.kompas.com, 2024.

<https://nasional.kompas.com/read/2024/09/23/16373111/tok-37-paslon-tunggal-versus-kotak-kosong-di-pilkada-2024-ini-daftarnya?page=all>.

Widiyana, Esti. “Eks Ketua DPC Hingga Driver Ojol Daftar Bacawali PKB Surabaya.” detik.com, 2024. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7326174/eks-ketua-dpc-hingga-driver-ojol-daftar-bacawali-pkb-surabaya>.

Yandwiputra, Ade Ridwan. “Kaleidoskop 2024: Dinamika KPK Menangani Sejumlah Kasus Korupsi.” TEMPO.co, 2024. <https://www.tempo.co/hukum/kaleidoskop-2024-dinamika-kpk-menangani-sejumlah-kasus-korupsi-1188443>.

Yusron Naufal Putra. “PKB Mulai Buka Pendaftaran Kandidat Calon Gubernur Untuk Pilgub Jatim 2024.” TribunJatim.com, 2024. <https://jatim.tribunnews.com/2024/04/22/pkb-mulai-buka-pendaftaran-kandidat-calon-gubernur-untuk-pilgub-jatim-2024>.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A